



DINAMIKA SISTEM POLITIK DI ASIA TENGGARA: ANALISIS KOMPARATIF INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF SISTEM POLITIK DAVID EASTON

¹Syafaatunnisa & ²Elly Nurlia

¹ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

6670240120@student.untirta.ac.id

² Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

ellynurlia@untirta.ac.id

Accepted: September 2026; Published: September 2026; Available online: September 2026

ABSTRACT

The debate over the efficiency of presidential and parliamentary systems is generally driven by normative assumptions that do not necessarily align with empirical reality. This study aims to compare the influence of the political systems in Indonesia and Malaysia on the state's response to public demands and on the formulation of effective policies. This is a qualitative study. Using a qualitative approach based on a literature review and David Easton's political system theory framework, this study examines the relationship between inputs (demands and support), the conversion process, and policy outputs in both countries. The results show that Indonesia, with its relatively open presidential system, has a high level of political participation but risks experiencing an overload that affects the complexity of decision-making and policy inconsistency. Conversely, Malaysia demonstrates efficiency in the policy conversion process through a more consolidated parliamentary system, but with limitations in the inclusivity of political participation. This study affirms that the effectiveness of a political system is not solely determined by institutional design, but rather by the interaction between historical factors, elite dynamics, social structures, and institutional capacity. These findings contribute to enriching the field of comparative politics by challenging institutional determinism and emphasizing the importance of strengthening institutional capacity and the quality of substantive political representation.

Keywords: *Comparative politics, political systems, policy effectiveness, David Easton*

ABSTRAK

Perdebatan mengenai efisiensi sistem presidensial dan parlementer umumnya didorong oleh asumsi-asumsi normatif yang belum tentu sejalan dengan kenyataan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh sistem politik di Indonesia dan Malaysia terhadap respons negara terhadap tuntutan publik serta terhadap perumusan kebijakan yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori sistem politik David Easton, penelitian ini mengkaji hubungan antara masukan (tuntutan dan dukungan), proses konversi, serta hasil kebijakan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, dengan sistem presidensialnya yang relatif terbuka, memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi namun berisiko mengalami kelebihan beban yang memengaruhi kompleksitas pengambilan keputusan dan inkonsistensi kebijakan. Sebaliknya, Malaysia menunjukkan efisiensi dalam proses implementasi kebijakan melalui sistem parlementer yang lebih terkonsolidasi, namun dengan keterbatasan dalam hal inklusivitas partisipasi politik. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas suatu sistem politik tidak semata-mata ditentukan oleh desain kelembagaan, melainkan oleh interaksi antara faktor-faktor historis, dinamika elit, struktur sosial, dan kapasitas kelembagaan. Temuan-temuan ini berkontribusi memperkaya bidang politik komparatif dengan menantang determinisme kelembagaan dan menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan serta kualitas representasi politik substantif.

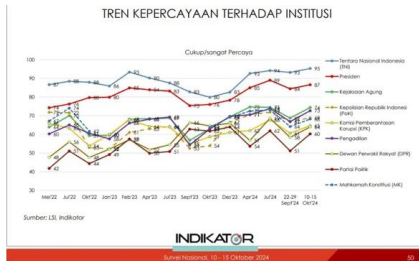
Kata kunci: Politik komparatif, sistem politik, efektivitas kebijakan, David Easton

PENDAHULUAN

Perbandingan lintas negara mengenai sistem politik dan pemerintahan merupakan cara penting untuk memahami bagaimana negara-negara merespons tuntutan masyarakat dan menyusun kebijakan yang efektif (Saleha, 2023). Pendekatan komparatif ini sangat relevan dalam konteks dua negara yang secara geografis berdekatan, memiliki ikatan sejarah dan budaya yang kuat, namun memiliki tatanan kelembagaan yang berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia (Ida et al., 2025). Keduanya mengklaim sebagai negara demokratis di kawasan Asia Tenggara. Namun dalam praktiknya, keduanya dijalankan oleh sistem politik yang sangat berbeda, baik dalam hal struktur negara, model pemerintahan, maupun pembagian kekuasaan

(Saleha, 2023). Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial yang menekankan pemisahan kekuasaan atau *separation of powers* (Jamiah, 2026). Di sisi lain, Malaysia adalah negara federal dengan sistem pemerintahan parlementer yang menekankan integrasi antara cabang eksekutif dan legislatif atau penggabungan kekuasaan *fusion of powers* (Saleha, 2023). Secara teoritis, perbedaan dalam desain kelembagaan ini seharusnya menyebabkan perbedaan dalam pola responsivitas dan efektivitas kebijakan. Namun, jika diteliti lebih lanjut, asumsi ini tidak selalu didukung secara empiris.

Indonesia adalah negara dengan populasi sekitar 270 juta jiwa (BPS, 2023) yang menghadapi tekanan politik yang sangat besar dan beragam. Berdasarkan data



survei kepercayaan publik, terdapat kesenjangan legitimasi yang signifikan di antara berbagai lembaga.

Gambar 1. Survei LSI Tren Kepuasan Atas Demokrasi

Sumber: databoks (2024)

Hasil survei menunjukkan kepuasan terhadap demokrasi sebesar 71,8% (Databoks, 2024). Hanya sekitar 51% masyarakat yang mempercayai partai politik, dan 54% masyarakat yang mempercayai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu, presiden memiliki tingkat kepercayaan sebesar 83%, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar 88% (Katadata, 2023).

Gambar 2. Tren kepercayaan terhadap Institusi

Sumber: Kumparan (2024)

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik memang tinggi, namun tidak semua lembaga dianggap memiliki legitimasi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh fenomena "kelebihan tuntutan." Contohnya adalah polemik Undang-Undang Cipta Kerja, yang telah memicu demonstrasi besar-besaran (Alianti et al., 2024). Tingkat partisipasi

pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81% (KPU, 2019), mencerminkan antusiasme elektoral.

Sebaliknya, Malaysia, dengan populasi sekitar 33 juta jiwa (AntaraNews, 2023), memperlihatkan dinamika politik yang tidak kalah kompleksnya meskipun berlangsung dalam bingkai yang berbeda. Dari sisi legitimasi pemerintah, Edelman Trust Barometer (2026) mencatat



tingkat kepercayaan masyarakat Malaysia terhadap pemerintah sebesar 62%, dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi mencapai 4-5% (Trading Economics, 2026). Sebuah angka yang cukup terhormat namun menyimpan catatan sejarah kepercayaan yang bergejolak. Kepercayaan ini sempat mengalami guncangan hebat akibat skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) kasus korupsi mega-skala yang dinyatakan Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai "the largest kleptocracy case to date" pada 2016, dengan lebih dari US\$4,5 miliar diduga

disalahgunakan dari dana investasi negara; (Britannica, 2023; Jones, 2020). Skandal ini merontokkan kepercayaan publik terhadap Perdana Menteri Najib Razak dan koalisi Barisan Nasional yang telah berkuasa lebih dari enam dekade, memicu gelombang protes melalui gerakan Bersih, dan pada akhirnya mendorong tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum ke-14 tahun 2018 hingga 82,3% dari sekitar 15 juta pemilih terdaftar (IFES, 2018; Britannica, 2023; Jati, 2023) salah satu angka tertinggi dalam sejarah Malaysia, sekaligus cerminan tuntutan akuntabilitas yang masif dari publik.

Di sisi kebijakan, Malaysia juga bergulat dengan warisan *New Economic Policy* (NEP) yang diberlakukan sejak 1971 pascakerusuhan rasial 13 Mei 1969. Kebijakan afirmatif berbasis etnis ini telah melembagakan ketegangan antara kelompok Melayu/Bumiputera (69%), Tionghoa (23%), dan India (7%) dalam struktur politik formal: meskipun berhasil mempersempit kesenjangan ekonomi antargolongan, NEP dinilai mempertahankan polarisasi sosial dan membatasi inklusivitas partisipasi politik (Dettman, 2024; Yamamoto & Suzuki, 2021). Kondisi ini komparatif antara Indonesia dengan partisipasi tinggi tetapi tekanan tuntutan yang masif, dan Malaysia dengan stabilitas terkelola tetapi terbebani oleh krisis legitimasi dan polarisasi

etnis, membuka pertanyaan yang lebih mendasar: apakah efektivitas sistem politik semata-mata ditentukan oleh desain institusional ataukah ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh?

Berbagai penelitian telah berupaya menjawab pertanyaan tersebut. Nugroho et al. (2024) membandingkan sistem pemilu legislatif Indonesia dan Malaysia dan menemukan bahwa sistem proporsional terbuka di Indonesia meningkatkan representasi namun menyebabkan fragmentasi partai, sementara sistem distrik di Malaysia menghasilkan stabilitas yang lebih tinggi. (Aryani et al., 2025) mengkaji mekanisme *checks and balances* dan menemukan bahwa pemisahan kekuasaan lebih tegas dalam sistem presidensial Indonesia, sedangkan Malaysia mengedepankan ketergantungan eksekutif pada parlemen. Safitri dan Nurdin (2024) menyoroti bahwa sistem pemilu di Indonesia belum mampu menghilangkan praktik oligarki dan politik uang, sehingga tingginya partisipasi tidak selalu menghasilkan output kebijakan yang efektif. Sementara itu, Rukmana & Yuliani, (2025).menegaskan bahwa sistem politik tidak hanya dibentuk oleh desain institusi formal, tetapi juga oleh faktor sejarah, budaya, dan struktur sosial. Pada level yang lebih luas, (Khuluqi & Muwahid et al., 2023) menunjukkan bahwa warisan kolonial memainkan peranan besar dalam membentuk

karakter sistem politik kedua negara: Indonesia yang dipengaruhi sentralisme kolonial Belanda cenderung membangun negara yang terpusat, sementara Malaysia mewarisi struktur desentralisasi kolonial Inggris (Kin Peng, 2026; Parto et al, 2025).

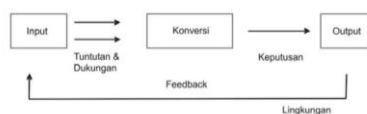
Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa kesenjangan yang belum terjawab secara memadai. Pertama, hanya sedikit penelitian yang membandingkan Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan kerangka teoretis yang secara simultan mampu menjelaskan hubungan antara *input*, proses konversi, dan *output* dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Kedua, faktor-faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, dan historis umumnya belum dimasukkan ke dalam satu kerangka analisis sistematis, melainkan dikaji secara terpisah-pisah. Ketiga, sebagian besar penelitian bersifat deskriptif-komparatif dan kurang argumentatif dalam menjelaskan implikasi perbedaan sistemik terhadap efektivitas kebijakan publik. Kesenjangan inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini: dibutuhkan analisis yang lebih komprehensif, sistematis, dan analitis untuk memahami mengapa perbedaan sistem politik antara Indonesia dan Malaysia

menghasilkan pola efektivitas kebijakan yang berbeda.

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pendekatan yang secara eksplisit mengisi kekosongan dalam literatur komparatif Indonesia-Malaysia: hingga saat ini, belum ada penelitian yang mengoperasionalkan kerangka sistem politik David Easton secara utuh mencakup keempat komponen *input*, konversi, *output*, dan *feedback* sekaligus sebagai instrumen analisis komparatif antara kedua negara. Sebagian besar kajian yang ada menggunakan Easton hanya sebagai latar belakang teoretis dekoratif, bukan sebagai kerangka analisis yang benar-benar dijalankan secara konsisten pada setiap tahap siklus politik. Lebih jauh, penelitian-penelitian terdahulu umumnya bersifat monodimensi: mengkaji desain institusional saja, atau dinamika elektoral saja, atau faktor historis saja tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang mampu menangkap interaksi antara aspek kelembagaan, sosial-budaya, historis, dan ekonomi secara bersamaan. Akibatnya, pertanyaan tentang mengapa perbedaan sistem Indonesia dan Malaysia menghasilkan kualitas demokrasi dan efektivitas kebijakan yang berbeda tidak pernah terjawab secara menyeluruh. Penelitian ini hadir

untuk menutup celah tersebut: dengan menjadikan teori Easton sebagai lensa analitis yang benar-benar dioperasionalkan, bukan sekadar dikutip, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dan substantif bagi studi politik komparatif di Asia Tenggara, sekaligus menantang asumsi determinisme institusional yang selama ini mendominasi perdebatan tentang efektivitas sistem presidensial versus parlementer.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini berangkat dari dua persoalan utama.



Pertama, bagaimana perbedaan sistem politik dan pemerintahan Indonesia dan Malaysia dalam mengelola tuntutan masyarakat (*input*), proses pengambilan kebijakan (*conversion*), serta output kebijakan publik (*output*)? Kedua, mengapa perbedaan sistem tersebut menghasilkan tingkat efektivitas kebijakan dan kualitas demokrasi yang berbeda, serta faktor apa yang paling berpengaruh dalam membentuk perbedaan tersebut? Sejalan dengan rumusan masalah ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis secara komparatif sistem politik Indonesia dan Malaysia dalam seluruh tahapan proses politik berdasarkan kerangka teori sistem David

Easton, serta menjelaskan secara kritis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut dan implikasinya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi di kedua negara.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan teori sistem politik David Easton sebagai kerangka analisis utama. Menurut Easton (1953) dalam Hanumanthappa, 2023), sistem politik didefinisikan sebagai serangkaian interaksi yang dipilih dari keseluruhan perilaku sosial, di mana nilai-nilai ditetapkan secara otoritatif bagi masyarakat.

Gambar 3. Alur kerja sistem politik

Sumber: (Pulami Magar, 2025)

Dalam konteks ini, sistem politik bekerja melalui mekanisme *input-proses-output-feedback*. Masukan berupa tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) diproses oleh berbagai aktor dan lembaga politik melalui tahap konversi, menghasilkan kebijakan publik sebagai *output*, yang kemudian memunculkan umpan balik (*feedback*) berupa reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Alianti et al., 2024; Pulami Magar, 2025).

Teori ini juga menekankan bahwa stabilitas dan efektivitas sistem politik bergantung pada kemampuan sistem dalam menyeimbangkan tuntutan dan

dukungan, karena jika terjadi *overload* tuntutan, stabilitas sistem dapat terganggu (Pulami Magar, 2025). Relevansi teori Easton untuk penelitian ini terletak pada kemampuannya memetakan secara sistematis bagaimana perbedaan desain kelembagaan Indonesia dan Malaysia berinteraksi dengan tekanan publik, dinamika elit, dan konteks sosio-historis dalam menghasilkan output kebijakan yang berbeda. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan struktur formal, tetapi juga cara-cara di mana tuntutan masyarakat diproses menjadi kebijakan serta bagaimana umpan balik memengaruhi keberlanjutan sistem politik secara adaptif (Kadir et al., 2025; Nugroho et al., 2024). Dengan demikian, komparasi Indonesia dan Malaysia dalam kerangka Easton bukan hanya mengungkap perbedaan desain institusional, tetapi juga membuka jalan bagi penelitian komparatif yang lebih substantif: mana titik dalam siklus *input-proses-output-feedback* yang menjadi penentu utama kualitas demokrasi dan efektivitas kebijakan di kawasan Asia Tenggara, sebuah pertanyaan yang relevansinya melampaui batas kedua negara dan berkontribusi pada perdebatan global tentang tata kelola demokratis di era kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* (studi kepustakaan). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial-politik yang bersifat kontekstual, interpretatif, dan tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka statistik (Creswell, 2013). Secara khusus, desain *library research* dipandang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan komparatif yang bersifat makro-sistemik yaitu bagaimana perbedaan desain kelembagaan Indonesia dan Malaysia menghasilkan pola efektivitas kebijakan yang berbeda karena fenomena ini membutuhkan sintesis argumentatif dari berbagai sumber literatur yang beragam, bukan pengumpulan data primer di lapangan (Subakti et al, 2023). Pendekatan ini lazim dan diakui validitasnya dalam tradisi studi politik komparatif, terutama ketika tujuan penelitian adalah membangun kerangka analitis yang kritis dan koheren berdasarkan rekonstruksi literatur, bukan menghasilkan generalisasi statistik (Marzuki, 2017)

Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang dipilih berdasarkan tiga kriteria: relevansi tematik (membahas sistem politik, tata kelola, atau demokrasi di

Indonesia dan/atau Malaysia), kemutakhiran (prioritas publikasi 2016–2026, dengan pengecualian untuk sumber *foundational* seperti Easton 1953, 1965), dan kredibilitas (jurnal *peer-reviewed*, laporan lembaga terpercaya seperti World Bank dan Edelman Trust Institute, serta buku akademik bereputasi). Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, ResearchGate, Sinta, dan portal jurnal daring relevan, termasuk jurnal JISIPOL Universitas Bale Bandung (Parto et al., 2025; Ahmad et al., 2025), dengan kata kunci seperti "*David Easton political system theory*", "*comparative politics Southeast Asia*", "*input-output political system*", dan variasinya dalam bahasa Indonesia maupun Inggris.

Analisis mengoperasionalkan kerangka Easton melalui empat tahap yang dijalankan secara iteratif. Pertama, pemetaan *input*: mengidentifikasi dan membandingkan tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) yang masuk ke sistem politik masing-masing negara mencakup partisipasi pemilih, kepercayaan publik, dan gerakan sosial, termasuk indikator melemahnya input otentik di Indonesia (Ahmad et al., 2025). Kedua, analisis konversi: menelaah bagaimana tuntutan diproses oleh partai, parlemen, koalisi, dan eksekutif, serta mengidentifikasi distorsi seperti dominasi elit dan politik dinasti yang merusak kualitas proses tersebut (Parto et al., 2025). Ketiga, evaluasi *output*:

membandingkan produk-produk kebijakan yang dihasilkan dari proses konversi di kedua negara, mencakup kebijakan publik utama dan regulasi, serta menilai kualitas distributif dan responsivitas kebijakannya secara kritis. Keempat, penelusuran *feedback*: menganalisis bagaimana reaksi masyarakat baik yang bersifat manifes seperti protes dan survei kepercayaan, maupun yang laten seperti apatisme memengaruhi siklus *input* berikutnya. Keempat tahap ini dijalankan secara iteratif dan saling menghubungkan, menghasilkan peta analitis yang utuh dari siklus *input-proses-output-feedback* di kedua negara.

Analisis data dilakukan melalui kombinasi dua teknik. Pertama, *analisis isi* (*content analysis*): setiap sumber literatur dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi argumen, data empiris, dan temuan yang relevan dengan salah satu atau lebih komponen kerangka Easton. Proses ini melibatkan pengkodean tematik (*thematic coding*), di mana unit-unit informasi dari berbagai sumber dikelompokkan berdasarkan tema analitis yang telah ditetapkan: *input*, konversi, *output*, dan *feedback*. Kedua, *analisis komparatif*: temuan yang telah dikodekan dibandingkan secara sistematis antara Indonesia dan Malaysia untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan anomali, dengan tujuan menghasilkan interpretasi analitis yang menjawab *mengapa* kedua

sistem menghasilkan pola efektivitas kebijakan yang berbeda bukan sekadar mendeskripsikannya (Rukmana & Yuliani, 2025). Seluruh proses analisis menggunakan logika *retroductive reasoning*, yaitu bergerak dari fenomena empiris yang teramati ke penjelasan teoretis yang paling plausibel berdasarkan kerangka Easton, bukan sekadar mendeskripsikan fakta secara kronologis.

Untuk menjamin kedalaman dan objektivitas analisis, penelitian ini menerapkan strategi *triangulasi sumber*, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber yang berbeda secara bersamaan: jurnal ilmiah *peer-reviewed*, laporan lembaga internasional, data survei publik, dan dokumen kebijakan resmi. Dengan mengkonfrontasikan perspektif-perspektif yang beragam ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsensus, ketegangan, dan kontradiksi dalam literatur yang justru memperkaya kedalaman analisis (Subakti et al, 2023). Sebagai contoh, data kepercayaan publik dari Edelman Trust Barometer (2026) dikontraskan dengan temuan survei LSI (Katadata, 2023) untuk memperoleh

gambaran yang lebih berimbang tentang legitimasi institusi di kedua negara. Selain itu, *triangulasi teori* juga diterapkan secara selektif: kerangka Easton digunakan sebagai lensa utama, namun temuan-temuannya dikritisi dengan perspektif lain seperti determinisme institusional (Nugroho et al., 2024) dan teori oligarki (Sahidin & Bakhtiar, 2025), guna menghindari penerimaan kerangka Easton secara *taken for granted* dan memastikan analisis tetap kritis.

Meskipun studi kepustakaan memiliki kekuatan dalam sintesis teoritis yang luas, penelitian ini secara kritis mengakui sejumlah keterbatasan yang perlu diperhitungkan dalam pembacaan temuan Pertama, keterbatasan sumber: penelitian bergantung pada literatur yang telah dipublikasikan, sehingga dinamika politik terkini yang belum terdokumentasikan dalam jurnal ilmiah tidak dapat sepenuhnya ditangkap. Kedua, keterbatasan akses data: beberapa data empiris yang ideal seperti data kepercayaan publik terperinci per institusi untuk Malaysia atau data anggaran kebijakan lintas periode tidak selalu tersedia secara terbuka, sehingga analisis *output* lebih banyak mengandalkan

indikator makro. Ketiga, batas inferensial: studi komparatif dua kasus secara metodologis tidak memungkinkan generalisasi kausal yang kuat ke negara-negara lain. Keterbatasan ini tidak mengurangi validitas penelitian, melainkan mendefinisikan batas-batas klaim yang dapat diajukan secara ilmiah dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan desain yang lebih empiris misalnya melalui wawancara mendalam dengan aktor kebijakan atau analisis dokumen kebijakan primer untuk memperkuat temuan penelitian ini (Subakti et al, 2023; Creswell, 2013)

PEMBAHASAN

Perbandingan Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia dan Malaysia

Dari segi bentuk negara, baik Indonesia maupun Malaysia merupakan negara demokrasi, namun keduanya memiliki landasan kelembagaan yang sangat berbeda. Indonesia adalah negara kesatuan di mana kedaulatan berada di tangan pemerintah pusat meskipun daerah-daerah memiliki otonomi (Arnita, 2025), sedangkan Malaysia adalah negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal dengan kewenangan konstitusional tertentu bagi masing-masing

negara bagian (Saleha, 2023). Perbedaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan bagaimana kekuasaan didistribusikan, dijalankan, dan dikontrol dalam sistem politik masing-masing negara.

Dalam konteks eksekutif, Indonesia menganut sistem presidensial, dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak bergantung pada parlemen, yang secara teori menjamin stabilitas kekuasaan (Saleha, 2023). Sedangkan, Malaysia menggunakan sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif formal berada di tangan raja (Yang di-Pertuan Agong), tetapi pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri, yang dipilih dari parlemen dan bergantung pada dukungan mayoritas legislatif, yang mencerminkan prinsip *fusion of powers* (Salsabila et al., 2024). Hal ini berarti bahwa Indonesia cenderung memiliki stabilitas masa jabatan bagi eksekutif, sementara Malaysia lebih fleksibel namun rentan terhadap pergeseran kekuasaan ketika dukungan parlemen berubah.

Di ranah legislatif, kedua negara mengadopsi sistem bikameral, namun dengan karakteristik yang berbeda, Indonesia memiliki DPR dan DPD di bawah naungan MPR, yang memiliki fungsi legislasi,

anggaran, dan pengawasan yang relatif terpisah dari eksekutif, sedangkan Malaysia memiliki Dewan Rakyat dan Dewan Negara, di mana Dewan Rakyat merupakan pusat kekuasaan legislatif sekaligus sumber penunjukan pejabat eksekutif, sehingga batas antara cabang legislatif dan eksekutif menjadi tidak jelas (Salsabila et al., 2024)

Dalam aspek yudikatif, Indonesia memiliki struktur peradilan yang lebih kompleks dan secara kelembagaan relatif kuat, di mana Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial berfungsi sebagai mekanisme checks and balances. Malaysia memiliki sistem peradilan berjenjang dengan Mahkamah Federal sebagai pengadilan tertinggi, meskipun dalam praktiknya sering dianggap lebih dekat dengan cabang eksekutif (Saleha, 2023). Secara teoritis, Indonesia didasarkan pada prinsip *separation of powers*, sedangkan Malaysia didasarkan pada *prinsip fusion of powers*. Namun, pada kenyataannya kedua sistem tersebut tidaklah sempurna.

Di Indonesia, dominasi koalisi politik di parlemen sering melemahkan pemisahan kekuasaan, sehingga fungsi pengawasan DPR menjadi kurang optimal, dan DPR cenderung menjadi ajang pembagian kekuasaan di antara para elit (Ida et al., 2025). Sebaliknya, di

Malaysia, tidak ada pemisahan kekuasaan yang ketat, tetapi kontrol politik atas eksekutif dijalankan melalui parlemen, yang dapat menggulingkan pemerintah, namun hal ini juga menyebabkan ketidakstabilan politik (Salsabila et al., 2024). Analisis ini dapat diperluas dengan kerangka teori sistem politik David Easton yang memandang politik sebagai proses dinamis dari input, proses, dan output.

Jadi dalam hal ini, Indonesia menghasilkan stabilitas sebagai output, tetapi proses konversinya terdistorsi, karena kompromi elit mendominasi tuntutan publik. Malaysia memiliki responsivitas yang tinggi terhadap input politik melalui perubahan dukungan parlemen, tetapi memiliki masalah dalam mempertahankan konsistensi outputnya karena ketidakstabilan dalam pemerintahan koalisi. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan, baik sistem presidensial maupun parlementer, bukanlah jaminan efektivitas sistem politik. Yang lebih menentukan adalah bagaimana kekuasaan dijalankan dan dikendalikan dalam praktiknya, di mana Indonesia cenderung kuat dalam stabilitas tetapi lemah dalam pengendalian, sementara Malaysia kuat dalam pengendalian tetapi rentan terhadap

ketidakstabilan (Salsabila et al., 2024; Saleha, 2023)

Persamaan dan Perbedaan Sistem Politik Indonesia dan Malaysia

Secara sekilas, Indonesia dan Malaysia sering dianggap sebagai negara yang serupa, karena memiliki banyak kesamaan seperti berdekatan secara geografis, memiliki warisan budaya Melayu yang sama, serta kedua negara tersebut mengklaim sebagai negara demokratis (Herlambang et al., 2023). Namun, jika ditelaah lebih dalam, persamaan-persamaan tersebut sebenarnya menyembunyikan perbedaan struktural yang cukup tajam. Pertanyaannya bukan hanya “apa yang berbeda”, tetapi mengapa perbedaan-perbedaan ini muncul dan bertahan.

Dari sisi geografis, kedua negara terletak di Asia Tenggara dan memiliki wilayah yang tersebar secara geografis. Namun, reaksi politik mereka terhadap kondisi geografis ini berbeda. Indonesia memilih untuk tetap menjadi negara kesatuan meskipun memiliki wilayah yang luas dan beragam (Herlambang et al., 2023). Pilihan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan integrasi nasional di tengah ancaman disintegrasi dan konflik regional. Sebaliknya, Malaysia muncul sebagai federasi negara-negara bagian. Ini berarti bahwa sejak awal telah ada pengakuan bahwa perbedaan regional harus

diakomodasi secara struktural dalam sistem politik (Marwah & Yulyana, 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa geografi bukanlah penentu langsung dari sistem politik, melainkan bagaimana elit politik menafsirkan tantangan geografis tersebut.

Secara historis, perbedaan kolonial menjadi faktor yang sangat menentukan. Indonesia berada di bawah kolonialisme Belanda yang umumnya bersifat sentralistik dan eksploitatif. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, terdapat dorongan kuat untuk membangun negara sentralistik yang kuat (Singi, 2025). Sebaliknya, Malaysia mewarisi sistem kolonial Inggris yang lebih bersifat administratif dan memperbolehkan keberadaan kerajaan-kerajaan lokal. Inilah alasan mengapa Malaysia mempertahankan monarki dan mengadopsi model parlemen Westminster (Herlambang et al., 2023). Namun, di sini muncul sebuah pertanyaan yakni apakah sistem politik saat ini benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat ataukah hanya replikasi warisan kolonial?.

Secara sosial dan budaya, Indonesia adalah negara yang sangat pluralistik dengan ratusan kelompok etnis dan bahasa. Kenyataan ini melahirkan ideologi Pancasila yang bersifat inklusif (Ali, 2019). Sebaliknya, Malaysia memiliki masyarakat yang lebih terfragmentasi antara suku Melayu, Tionghoa, dan India, yang

kemudian dilembagakan dalam politik melalui kebijakan afirmatif seperti kebijakan Bumiputera (Marwah & Yulyana, 2024). Namun, perbedaan ini juga memunculkan pertanyaan, apakah politik identitas di Malaysia merupakan cerminan sejati dari realitas sosial, ataukah hal itu dipertahankan karena melayani kepentingan sebagian elit politik?. Dalam banyak kasus, politik berbasis etnis justru memperkuat polarisasi, bukan menyelesaikan perbedaan.

Dari segi ekonomi, Malaysia dianggap lebih maju daripada Indonesia, berdasarkan pendapatan per kapita dan stabilitas ekonomi. Hal ini biasanya disebabkan oleh sistem politik yang lebih terstruktur (Nikmah, 2025). Namun, argumen ini perlu ditelaah lebih lanjut. Stabilitas ekonomi Malaysia tidak hanya bergantung pada sistem politiknya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan afirmatif dan intervensi negara yang kuat dalam perekonomian (Marwah & Yulyana, 2024). Indonesia, dengan sistem politiknya yang lebih terbuka, menghadapi tantangan koordinasi kebijakan yang lebih kompleks (Susanti, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara sistem politik dan kinerja ekonomi tidak bersifat linier, melainkan bergantung pada banyak variabel lain.

Dari sudut pandang politik, perbedaan antara sistem presidensial Indonesia dan sistem parlementer Malaysia biasanya dipahami dalam istilah normatif, dimana sistem presidensial dianggap stabil, sementara sistem parlementer dianggap fleksibel. Namun, pada kenyataannya, kedua sistem tersebut dipenuhi dengan kontradiksi. Indonesia memiliki stabilitas masa jabatan, namun stabilitas ini sering kali diperoleh dengan mengorbankan kompromi politik yang melemahkan fungsi pengawasan. Di sisi lain, Malaysia, yang secara teoritis memiliki fleksibilitas lebih besar, sering menghadapi krisis politik akibat konflik internal dalam koalisi (Sahidin & Bakhtiar, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa jenis sistem tidak hanya menentukan stabilitas dan efektivitas, tetapi juga praktik politik di dalamnya.

Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui kerangka David Easton sebagai masalah perbedaan *input* dan *environment* dalam sistem politik. Indonesia menerima *input* yang menuntut keragaman dan integrasi nasional. Hal ini menciptakan sistem yang inklusif namun kompleks. Malaysia menerima *input* berupa tuntutan pembagian kekuasaan di antara kelompok etnis, yang mengarah pada sistem yang lebih terorganisir namun juga lebih eksklusif (Nurdin & Romli, 2025).

Namun, penting untuk ditekankan bahwa input dalam sistem politik tidak selalu berasal dari masyarakat saja. Input dalam banyak kasus sebenarnya dibentuk oleh elit politik melalui narasi, kebijakan, dan institusi. Hal ini menyiratkan bahwa perbedaan antara Indonesia dan Malaysia bukan hanya soal kondisi objektif, tetapi juga soal bagaimana realitas tersebut dibangun secara politik.

Secara kritis, dapat dikatakan bahwa perbedaan sistem politik Indonesia dan Malaysia bukanlah sesuatu yang “alamiah”, melainkan hasil dari proses historis, kepentingan elit, dan pilihan politik yang terus-menerus direproduksi. Indonesia telah memilih inklusivitas dengan mengorbankan kompleksitas, sedangkan Malaysia telah memilih struktur yang lebih terkontrol dengan mengorbankan eksklusivitas (Herlambang et al., 2023). Dilihat dari perspektif ini, perbandingan antara kedua negara tidak hanya menyoroti perbedaan mereka, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang lebih luas, apakah sistem politik saat ini benar-benar melayani kepentingan rakyat, ataukah justru mencerminkan kepentingan elit yang menopangnya?

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perbedaan Sistem Politik Indonesia dan Malaysia

Perbedaan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia dan Malaysia tidak

dapat dipisahkan dari interaksi kompleks antara faktor-faktor sejarah, politik, ekonomi, dan budaya. Keempat faktor ini tidak hanya memengaruhi sistem-sistem tersebut, tetapi juga menjelaskan mengapa perbedaan-perbedaan ini tetap bertahan hingga saat ini.

Dari sudut pandang sejarah, warisan kolonial memegang peranan penting. Belanda menerapkan pemerintahan kolonial yang sangat terpusat di Indonesia, dan setelah kemerdekaan terdapat kecenderungan untuk membentuk negara yang kuat dan terpusat. Hal ini tercermin dalam pilihan bentuk negara kesatuan dan kecenderungan untuk memusatkan kendali atas daerah-daerah. Sebaliknya, Malaysia berkembang di bawah kolonialisme Inggris, dengan kebijakan pemerintahan tidak langsung dan pelestarian struktur kerajaan lokal. Warisan ini menjadi alasan di balik berlanjutnya sistem monarki dan federal di Malaysia (Khuluqi & Muwahid et al., 2023). Namun, penjelasan historis ini tidaklah cukup. Dalam banyak kasus, warisan kolonial justru dipertahankan karena menguntungkan bagi elit politik pasca-kemerdekaan. Ini berarti bahwa sistem politik saat ini bukan sekadar “warisan”, melainkan hasil dari proses seleksi politik yang terus mereproduksi dirinya sendiri.

Secara politik, terdapat perbedaan dalam cara kekuasaan

dijalankan dan diawasi. Indonesia pasca-reformasi menunjukkan kecenderungan menuju demokrasi yang lebih terbuka dengan persaingan multipartai dan pemilihan langsung. Namun, penelitian menunjukkan bahwa patronase dan ikatan klientelistik masih memainkan peran yang signifikan dalam politik Indonesia, dengan distribusi sumber daya sebagai sarana untuk mempertahankan dukungan politik (Sahidin & Bakhtiar, 2025). Hal ini mengakibatkan fungsi pengawasan yang lemah, karena elit politik cenderung memiliki hubungan transaksional. Malaysia sendiri telah lama menjadi negara di mana satu koalisi besar mendominasi politik. Hal ini membawa stabilitas tetapi juga menghambat oposisi. Ketika dominasi ini mulai runtuh, justru muncul instabilitas politik akibat fragmentasi kekuasaan. Studi menunjukkan bahwa sistem parlementer Malaysia sangat bergantung pada kohesi elit di dalam koalisi, oleh karena itu, ketika kohesi melemah, sistem menjadi tidak stabil (Nugroho et al., 2024). Hal ini berarti stabilitas politik tidak hanya berkaitan dengan sistem, tetapi juga dengan konsolidasi elit.

Dari segi ekonomi, kedua negara tersebut telah mengambil pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan pembangunan. Malaysia telah menerapkan

kebijakan afirmatif seperti *New Economic Policy* (NEP) untuk mengurangi ketimpangan antaretnis. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga memperkuat hubungan antara negara dan beberapa kelompok di ranah politik. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang lebih kompleks karena wilayah dan populasinya yang luas. Desentralisasi fiskal di Indonesia membuka jalan bagi daerah-daerah untuk berkembang, tetapi juga menciptakan peluang terjadinya korupsi dan pengawasan yang lemah di tingkat lokal (Arnita, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidaklah netral, melainkan secara langsung terkait dengan struktur politik dan distribusi kekuasaan.

Dari sisi budaya daana sosial, perbedaan utamanya terletak pada cara menangani keragaman. Indonesia telah mengadopsi pendekatan inklusif melalui Pancasila untuk merangkul identitas-identitas yang beragam. Namun, politik identitas tentu saja masih muncul dalam praktiknya, terutama dalam konteks pemilu. Sementara itu, sistem politik Malaysia secara lebih eksplisit melembagakan identitas etnis (Sahidin & Bakhtiar, 2025). Hal ini membuat politik di Malaysia lebih terstruktur, tetapi juga berisiko memperkuat

polarisasi sosial. Yang harus ditekankan secara kritis adalah bahwa budaya seringkali bukanlah faktor yang “*given*”, melainkan dibangun dan dimobilisasi dalam politik. Para elit politik di kedua negara memanfaatkan isu-isu identitas untuk menggalang dukungan, tetapi dengan cara yang berbeda.

Secara menyeluruh, perbedaan antara Indonesia dan Malaysia bukanlah hasil dari satu faktor saja, melainkan interaksi antara sejarah kolonial, dinamika elit politik, strategi ekonomi, dan konstruksi budaya. Indonesia telah menjadi sistem yang lebih terbuka namun kompleks dan rentan terhadap praktik patronase, sementara Malaysia telah menjadi sistem yang lebih terstruktur namun rentan terhadap ketidakstabilan politik ketika keseimbangan di antara para elit terganggu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem politik tidak dapat dipahami hanya dengan melihat desain institusionalnya, melainkan harus dipahami sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan, kepentingan, dan konteks sosial yang terus berubah.

Analisis Sistem Politik Indonesia dan Malaysia dalam Kerangka Input-Proses-Output-Feedback David Easton

Untuk menjawab kesenjangan yang telah diidentifikasi pada bagian kajian teori, sub-bagian ini secara

eksplisit mengoperasionalkan kerangka sistem politik David Easton ke dalam empat komponennya, yakni *input*, *konversi*, *output*, dan *feedback*, sebagai instrumen analisis komparatif, bukan sekadar latar belakang teoretis semata. Penerapan kerangka ini secara konsisten menghasilkan temuan yang lebih tajam dibandingkan deskripsi struktural pada bagian sebelumnya, yakni bahwa citra “Indonesia yang terbuka namun inefisien” dan “Malaysia yang tertutup namun efisien” sesungguhnya bukan perbedaan substansial dalam kualitas demokrasi, melainkan perbedaan mengenai pada titik mana dalam siklus *input-proses-output-feedback* masing-masing sistem menyerap tekanan dan menyembunyikan distorsinya.

Pada tahap *input*, perbandingan yang hanya didasarkan pada volume tuntutan, populasi sekitar 270 juta jiwa di Indonesia berbanding 33 juta jiwa di Malaysia, bersifat dangkal secara metodologis apabila tidak disertai analisis terhadap komposisi dan saluran masuknya tuntutan tersebut. Tingkat partisipasi pemilih Indonesia yang mencapai 81% pada Pemilu 2019 (Komisi Pemilihan Umum, 2019) tidak secara otomatis merepresentasikan tuntutan otonom masyarakat sipil; sebagian besar darinya lebih tepat dikategorikan sebagai *withininput*, yakni istilah yang digunakan

Easton (1965) untuk tuntutan yang dibangkitkan dari dalam sistem politik itu sendiri oleh para aktor politik, bukan murni berasal dari lingkungan masyarakat. Praktik klientelisme dalam sistem proporsional terbuka, di mana kandidat membangun basis dukungan melalui distribusi sumber daya personal ketimbang program (Hannan, 2023) serta keberlanjutan patronase yang berakar pada struktur kekuasaan pasca-kolonial (Sahidin & Bakhtiar, 2025), besar “tuntutan” yang masuk ke sistem politik Indonesia merupakan hasil mobilisasi elite, bukan ekspresi independen warga negara. Sebaliknya, rendahnya volume tuntutan di Malaysia tidak dapat ditafsirkan sebagai indikasi masyarakat yang lebih puas, melainkan sebagai hasil penyaringan struktural sejak hulu, karena kebijakan afirmatif berbasis etnis seperti Bumiputera dan *New Economic Policy* (NEP) telah melembagakan kanal artikulasi tuntutan berdasarkan garis etnis sejak awal (Marwah & Yulyana, 2024). Dengan demikian, perbandingan input yang memadai seharusnya tidak bertanya “siapa yang menuntut lebih banyak”, melainkan “tuntutan siapa yang diizinkan masuk ke dalam sistem, dan melalui saluran apa”.

Pada tahap konversi, kerangka Easton menempatkan

partai, parlemen, dan eksekutif sebagai aktor yang mengubah tuntutan menjadi keputusan mengikat (Alianti et al., 2024). Di Indonesia, fenomena koalisi gemuk, di mana hampir seluruh partai besar bergabung ke dalam pemerintahan, secara faktual mengubah fungsi konversi dari mekanisme agregasi kepentingan publik menjadi forum negosiasi antar-elite untuk membagi akses kekuasaan (Kadir et al., 2025). Implikasinya serius: ketika tahap konversi dikuasai oleh logika pembagian kekuasaan, volume input yang tinggi tidak lagi menjadi prediktor kualitas output, sebab variabel yang sesungguhnya menentukan adalah pola kompromi antar-elite koalisi, bukan derajat keterwakilan tuntutan publik. Inilah yang menjelaskan secara lebih presisi mengapa kontroversi UU Cipta Kerja tetap dapat disahkan meskipun ditolak melalui demonstrasi besar-besaran: ia adalah produk konversi elite, bukan sekadar kegagalan akibat *overload* input semata. Di Malaysia, sebaliknya, efisiensi konversi yang dipuji dalam literatur sesungguhnya merupakan bentuk lain dari konsentrasi risiko, bukan keunggulan struktural. Karena keberlangsungan eksekutif sepenuhnya bergantung pada kohesi koalisi parlemen, sistem tersebut tidak memiliki ruang penyesuaian gradual; ketika kohesi elite retak, sebagaimana

ditunjukkan oleh rangkaian pergantian pemerintahan Malaysia pasca-2018, seluruh proses konversi dapat kolaps sekaligus (Nugroho et al., 2024). Artinya, kecepatan konversi di Malaysia dibayar dengan kerapuhan sistemik, sementara stabilitas masa jabatan di Indonesia dibayar dengan kompromi yang melemahkan fungsi pengawasan. Tidak satu pun dari kedua pola tersebut merupakan konversi yang sehat dalam makna normatif yang dimaksudkan Easton, yaitu penerjemahan tuntutan secara proporsional menjadi kebijakan yang responsif.

Pada titik ini, kerangka Easton perlu diuji secara kritis, bukan sekadar diterapkan. Easton mendefinisikan output sebagai keputusan otoritatif yang dihasilkan sistem tanpa secara eksplisit mempersoalkan kandungan distributifnya, yaitu siapa sesungguhnya memperoleh manfaat darinya. Para pengkritik telah lama menunjukkan bahwa orientasi Easton terhadap keberlangsungan sistem (*system persistence*) membuat kerangka ini cenderung menilai keberhasilan dari sudut pandang berfungsinya sistem itu sendiri, bukan dari kualitas substantif kebijakan yang dihasilkannya (Leslie, 1972). Kelemahan ini sangat relevan untuk membaca data dalam penelitian ini. Stabilitas pertumbuhan ekonomi Malaysia sebesar 4-5% pasca-pandemi (World Bank, 2023) dapat dicatat

sebagai output yang berhasil dalam logika Easton, tetapi logika tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut terdistribusi secara tidak merata di antara kelompok etnis akibat kebijakan afirmatif yang telah berjalan puluhan tahun (Marwah & Yulyana, 2024; Nikmah, 2025). Begitu pula, output kebijakan Indonesia yang dianggap responsif terhadap tuntutan publik perlu diuji dengan pertanyaan yang sama: apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab tuntutan mayoritas, atau menjawab tuntutan kelompok yang paling mampu mengonversi suaranya menjadi akses politik, sebuah pertanyaan yang langsung mengarah pada persoalan dominasi oligarki dan elite ekonomi dalam politik yang telah diidentifikasi sebagai kelemahan mendasar demokrasi prosedural Indonesia. Dengan kata lain, baik Indonesia maupun Malaysia dapat dinyatakan “berhasil” menurut kriteria output Easton, tetapi keberhasilan tersebut tidak berarti pemerataan kesejahteraan, sehingga kerangka Easton perlu dilengkapi, bukan digantikan, dengan analisis distributif agar dapat menjelaskan kualitas pemerintahan secara menyeluruh.

Pada tahap *feedback*, perbedaan yang tampak antara Indonesia dan Malaysia juga membutuhkan pembacaan yang lebih kritis. Umpan balik di Indonesia bersifat *manifest*, yakni

muncul secara terbuka dalam bentuk protes, pemberitaan kritis, dan kesenjangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tertentu (Katadata, 2023), sehingga secara teoretis seharusnya memicu penyesuaian pada siklus input berikutnya sebagaimana diasumsikan Easton. Namun dalam praktiknya, sistem politik Indonesia lebih sering menyesuaikan narasi dan komunikasi politik ketimbang substansi kebijakan, sebuah bentuk “penangkapan umpan balik” yang sejalan dengan distorsi yang telah terjadi pada tahap konversi. Sebaliknya, rendahnya intensitas umpan balik negatif di Malaysia tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti tingkat dukungan publik yang secara genuin lebih tinggi. Tren kemunduran kualitas demokrasi di kawasan Asia Tenggara, termasuk terbatasnya kebebasan sipil dan ruang pengawasan publik (Ramadhan & Masykuri, 2024), menunjukkan bahwa sebagian umpan balik negatif di Malaysia kemungkinan bersifat *laten*, tertahan oleh keterbatasan ruang partisipasi, bukan benar-benar tidak ada. Perbedaan antara umpan balik manifes dan laten ini penting karena keduanya memiliki implikasi yang sangat berbeda terhadap keberlanjutan sistem: umpan balik manifes yang diabaikan dapat terakumulasi menjadi krisis legitimasi terbuka, sementara umpan balik laten yang

tertekan berisiko meledak secara tiba-tiba ketika represi struktural melemah, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman ketidakstabilan elite di Malaysia pasca-2018.

Secara keseluruhan, penerapan kerangka Easton secara konsisten pada keempat komponennya menghasilkan kesimpulan yang lebih tajam daripada sekadar mengonfirmasi dikotomi “terbuka versus stabil”. Kedua negara pada dasarnya menghadapi persoalan struktural yang serupa, yaitu dominasi elite dalam memediasi hubungan antara tuntutan masyarakat dan kebijakan yang dihasilkan, namun keduanya menempatkan titik mediasi tersebut pada tahap siklus yang berbeda. Indonesia memusatkan distorsi pada tahap konversi melalui koalisi elite yang gemuk, sementara Malaysia memusatkan distorsi pada tahap input melalui penyaringan etnis dan ketergantungan pada kohesi koalisi. Implikasinya, perbedaan performa kedua negara bukanlah bukti bahwa salah satu desain kelembagaan, presidensial atau parlementer, secara inheren lebih unggul, melainkan bukti bahwa kemampuan elite untuk mengendalikan titik-titik kritis dalam siklus input-proses-output-feedback adalah variabel yang jauh lebih menentukan daripada bentuk formal sistem itu sendiri. Temuan ini memperkuat argumen

utama penelitian ini, namun sekaligus menegaskan bahwa kerangka Easton, betapapun bergunanya untuk memetakan siklus tuntutan dan kebijakan, perlu dibaca secara kritis dan tidak diterima sebagai penjelasan yang netral terhadap kekuasaan, mengingat ia dirancang untuk menjelaskan keberlangsungan sistem, bukan untuk menilai siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh keberlangsungan tersebut (Leslie, 1972; Easton, 1965).

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan efektivitas sistem politik Indonesia dan Malaysia tidak ditentukan semata-mata oleh pilihan sistem presidensial atau parlementer, melainkan oleh bagaimana tuntutan masyarakat diproses, dimediasi, dan dikendalikan dalam siklus politik. Melalui kerangka sistem politik David Easton, terungkap bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama menghadapi dominasi elite dalam proses pengelolaan tuntutan publik, tetapi pada titik yang berbeda. Indonesia cenderung mengalami distorsi pada tahap konversi ketika tuntutan masyarakat dimediasi melalui kompromi dan koalisi elite yang kuat, sedangkan Malaysia mengalami distorsi sejak tahap input melalui penyaringan tuntutan yang dipengaruhi struktur etnis dan ketergantungan pada kohesi politik dalam koalisi pemerintahan. Temuan ini

menegaskan bahwa kualitas demokrasi dan efektivitas kebijakan lebih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, pola relasi elite, serta konteks historis dan sosial-politik dibandingkan oleh desain institusional formal semata. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kritik terhadap pandangan determinisme institusional dan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem politik ditentukan oleh kemampuan sistem dalam mengelola hubungan antara masyarakat, elite, dan kebijakan secara responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Romadhon, R., & Putri, P. (2025). Analisis tingkat penurunan partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum tahun 2024: Studi kasus TPS 4 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1655>
- Alianti, T. Y., Ketut, I., Erawan, P., & Erviantono, T. (2024). The Application Of David Easton System Theory In The Policy-Making Process Of Using Foreign Workers In Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2985(6), 93–95. <https://doi.org/10.30596/degalata.v6i1.5536>

- AntaraNews (2023). DOSM perkirakan penduduk Malaysia mencapai 33,4 juta di 2023. Diakses pada 16 Mei 2026,, dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/381177/dosm-perkiraan-penduduk-malaysia-mencapai-334-juta-di-2023>
- Arnita. (2020). *Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Presidential Government System In The Unitary Of Republic Of Indonesia*.
- Aryani, S., Lauren, A., Bella, A., Imania, K., Suryani, R. A., & Azzahri, R. (2025). Perbandingan Mekanisme Checks And Balance Dalam Sistem Pemerintah Indonesia Dan Malaysia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(5), 8326.
- Databoks.katadata.co.id (2024). Survei LSI: Kepuasan Masyarakat terhadap Demokrasi Menurun. Diakses pada 24 Mei 2026, dari <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/02/19/survei-lsi-kepuasan-masyarakat-terhadap-demokrasi-menurun>
- Dettman, S. (2024). Challenges of ethnic party adaptation in power-sharing systems: Evidence from Malaysia. *Jurnal Urusan Asia Tenggara Terkini*, 43 (1), 26-47.
- <https://doi.org/10.1177/18681034231217771>
- Edelman.com (2026). 2026 Edelman Trust Barometer Trust Amid Insularity Malaysia Report. Diakses pada 18 Juni 2026, dari https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/my/2026-05/2026%20Edelman%20Trust%20Barometer_Malaysia%20Report.pdf
- Hannan, A., (2023). Institut Agama Islam Negeri Madura. *Indonesia Walisongo Law Review (Walrev)*, 5(1). <https://doi.org/10.21580/walrev/2023.5.1.14924>
- Herlambang, D., Muda, I., & Zildjianda, R. (2023). *Comparison Of Government Systems Between Malaysian And Indonesian* (Vol. 18, Number 1).
- Ida, R., Mashud, M., Saud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2025). Politics in Indonesia: democracy, social networks and youth political participation. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432071>
- International Foundation for Electoral Systems. (2018). *Indonesia. ElectionGuide*. <https://www.electionguide.org/countries/id/131/>
- Jati, W. R. (2023). Managing ethno-nationalism within special

- territorial autonomy policy: Comparative cases between Aceh and Papua. *Jurnal Politik*, 9(1), 1-27.
<https://doi.org/10.7454/jp.v9i1.1149>
- John W. Creswell - *Qualitative Inquiry And Research Design_ Choosing Among Five Approaches*-SAGE Publications (2013).
- Jones, D. S. (2020). 1MDB corruption scandal in Malaysia: A study of failings in control and accountability. *Public Administration and Policy*, 23(1), 59-72.
<https://doi.org/10.1108/PAP-11-2019-0032>
- Kadir, M. Y. A., Shafiya, N., & Kurniasari, E. (2025). Regulating Political Funding in Southeast Asia: A Comparative Legal Analysis of Transparency and Accountability in Malaysia and Indonesia. *Journal of Humanity and Social Justice*, 178-200.
<https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i2.76>
- Katadata.co.id (2023). Survei LSI: Kepercayaan Terhadap DPR dan Partai Politik Paling Rendah. Diakses pada 24 Mei 2026, dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/64ae573e4baf8/survei-lsi-kepercayaan-terhadap-dpr-dan-partai-politik-paling-rendah>
- Khuluqi & Muwahid, M. A., Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Yani, J. A., & Surabaya, I. (2023). *Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*. 26(2).
- Maris Gunawan Rukmana, Ms., & Dwi Putri Yuliani, Ms. (2025). *Sistem Politik Dan Perbandingan Politik Dengan Negara Lain*. Retrieved www.langsungterbit.com
- Marwah, S., & Yulyana, E. (2024). *Perbandingan Kepemimpinan Negara Malaysia Dan Indonesia Sebagai Negara Yang Menganut Sistem Demokrasi*.
- Nikmah, R. (2025). Perbandingan Administrasi Negara Indonesia Dengan Malaysia. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 2498-2514.
- Nugroho, R. M., Asmorojati, A. W., Setyaningrum, W., & Shuaib, F. S. (2024). A Comparison of Legislative Election Systems in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 78-94.
<https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.21485>
- Nurdin, A., & Romli, O. (2025). Political Parties and Parliamentary Seat Replacement: a Comparative Study Across Five Democracies. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 10(1), 2503-4456.
<https://doi.org/10.15294/ipsr.v10i1>
- Parto, H. G., Nadila, Y., & Wijanarko, R. (2025). Politik dinasti dan tantangan demokrasi: Kajian

- filosofis Machiavelli dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil di Indonesia. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 22–43.
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1543>
- Pulami Magar, R. B. (2025). Input-Output Analysis in the Policy-Making Process: An Analysis of the Systems Theory. *Chaturbhujeshwar Academic Journal*, 3(1).
<https://doi.org/10.3126/caj.v3i1.86869>
- Ratna Ayu Safitri, H. (2024). *Analisis Implementasi Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Terhadap Sistem Politik di Indonesia (1955-2024): Perspektif Perbandingan*.
- Rsis.edu.sg (2025). Ekonomi Malaysia Pasca-Pandemi-Pemulihan Dua Kecepatan. Diakses pada 24 Mei 2026, dari
<https://rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/malaysias-post-pandemic-economy-a-two-speed-recovery/>
- Safa Salsabila, A., Nasella, D., Happy Paramita, D., Yuri Julianzie, T., Aprilia Putri, V., & Tamsyah, I. (2025). Political Coalition: Comparative Case Study of the Malaysian and Indonesian Government Systems 2015-2022 Koalisi Politik: Studi Kasus Perbandingan Sistem Pemerintahan Malaysia dan Indonesia Tahun 2015-2022. In *JuSS: Jurnal Sosial Soedirman* (Vol. 8, Number 1).
- Saleha, A. M. (2023). Perbandingan Antara Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dan Malaysia. *Datuk Sulaiman Law Review DalRev*, 4(2), 47–60.
- Singi, A. P. (2025). *Orde Indonesia Raya: Sejarah, Politik, dan Arah Baru Kepemimpinan Nasional*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nnSUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=patronase+akar+rumpun+pdip+pemilu+legislatif+2024&ots=PzEHjP6sYc&sig=KNGPeZyS704A6C3UsX0xlG6bqpA>
- Subakti, H., Hurit, R. U., Eni, G. D., et al. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Media Sains Indonesia.
- Sulthoni Ajie Sahidin, & Handar Subhandi Bakhtiar. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Konstitusi Indonesia dan Malaysia dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 317–327.
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1120>
- Susanti, R. (2025). Analysis of the Presidential Government Model in Indonesia: Advantages, Disadvantages, and Suitable Alternatives. *Social Impact Journal*, 4(1), 59–65.
<http://journal.goresearch.id/ind>

ex.php/sij/indexhttp://journal.
goresearch.id/index.php/sij/ind
ex

Trading Economics. (2026). Tingkat pertumbuhan PDB Malaysia tahunan. Diakses pada 16 Mei 2026, dari <https://id.tradingeconomics.com/malaysia/gdp-growth-annual/news/471136>

Yamamoto, A., & Suzuki, H. (2021). Income inequality in Malaysia: A comparative analysis of Malay and Chinese Malay perspectives. *International Journal of Political and Social Sciences*, 6(1), 1-15. [https://topjournals.org/index.p
hp/IJPSS](https://topjournals.org/index.php/IJPSS)